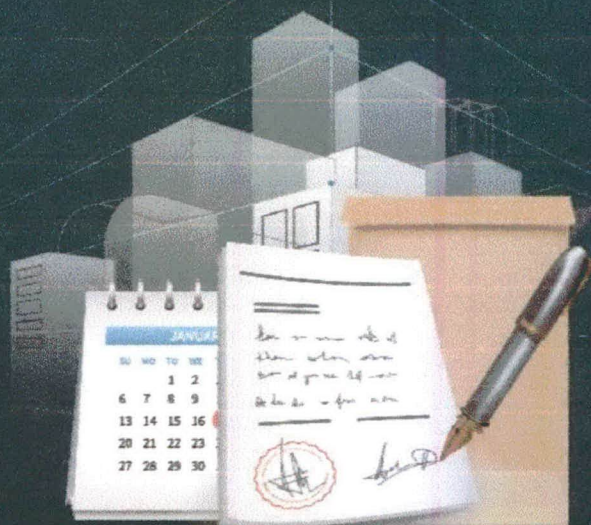




PERJANJIAN KINERJA 2023



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi Karya Sumadi
Jabatan : Menteri Perhubungan Republik Indonesia

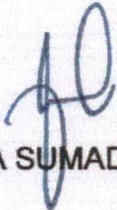
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

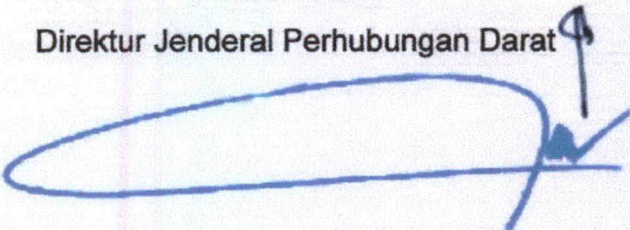
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Januari 2023

Pihak Kedua,
Menteri Perhubungan


BUDI KARYA SUMADI

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perhubungan Darat


Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

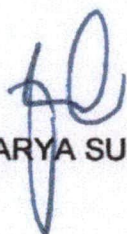
NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2		3		4	5
1	SP 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Rasio	0,926
			IKP 5	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	Rasio	0,636
2	SP 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	IKP 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	94,057
			IKP 6	On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,310
			IKP 7	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	40,867
3	SP 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,015
			IKP 2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,039
4	SP 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	IKP 1	Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat <i>class action</i> oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan	%	0,100
5	SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	79,500

Kegiatan**Anggaran**

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat | Rp. 2.039.301.202.000,00 |
| 2. Pelayanan Transportasi Darat | Rp. 892.781.850.000,00 |
| 3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat | Rp. 1.325.462.453.000,00 |
| 4. Penunjang Teknis Transportasi Darat | Rp. 479.042.664.000,00 |
| 5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. 509.619.810.000,00 |
| 6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat | Rp. 526.959.300.000,00 |
| 7. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat | Rp. 17.738.324.000,00 |

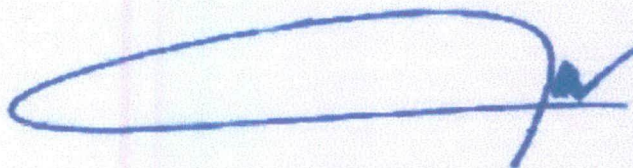
Disetujui
Menteri Perhubungan

BUDI KARYA SUMADI



Jakarta, Januari 2023
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Copyright © 2023 - Bagren Hubdat